
Dampak Kebijakan Zonasi Sekolah Terhadap Keadilan Akses dan Mutu Pendidikan : Kajian Literatur

Nurul Laily Magfiroh ^{1, a}, Mahfudin ^{2, b}

¹ Universitas Majalengka, Majalengka, Indonesia ²

Universitas Majalengka, Majalengka, Indonesia

^a nurullailymagfiroh27@gmail.com ; ^b mahfudin893@gmail.com

Receipt: Artikel dikirim; Revision: Artikel diputuskan revisi; Accepted: Artikel diputuskan diterima @The
Author(s) 2024

Abstract:

Equitable access and quality of education in Indonesia. Although designed to eliminate the gap between superior and non-superior schools, its implementation still faces various challenges that affect its effectiveness and fairness. This study aims to analyze the impact of the school zoning policy on equitable access and quality of education through a literature review approach of various national and international research results for the period 2018–2024. The analysis was conducted critically by examining patterns of findings, implementation issues, and policy implications for educational equity. The results of the study indicate that the zoning policy plays a role in expanding educational access, increasing community participation, and reducing discrimination based on achievement and economics. However, this policy has not been fully effective in creating equitable quality of education due to resource inequality, public perceptions of favored schools, and limited educational infrastructure in the regions. This study emphasizes the importance of strengthening school quality across zones, transparency of student admission mechanisms, and continuous evaluation of equity-based policies to achieve equitable and balanced educational quality.

Keywords: school zoning policy; fair access; quality of education

Abstrak :

Kebijakan zonasi sekolah merupakan instrumen strategis pemerintah untuk mewujudkan pemerataan akses dan mutu pendidikan di Indonesia. Meskipun dirancang untuk menghapus kesenjangan antara sekolah unggulan dan non-unggulan, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan yang memengaruhi efektivitas dan keadilannya. Penelitian ini bertujuan menganalisis dampak kebijakan zonasi sekolah terhadap keadilan akses dan mutu pendidikan melalui pendekatan kajian literatur terhadap berbagai hasil penelitian nasional dan internasional periode 2018–2024. Analisis dilakukan secara kritis dengan menelaah pola temuan, isu implementasi, serta implikasi kebijakan terhadap pemerataan pendidikan. Hasil kajian menunjukkan bahwa kebijakan zonasi berperan dalam memperluas akses pendidikan, meningkatkan partisipasi masyarakat, dan mengurangi diskriminasi berbasis prestasi serta ekonomi. Namun demikian, kebijakan ini belum sepenuhnya efektif dalam menciptakan pemerataan mutu pendidikan akibat ketimpangan sumber daya, persepsi masyarakat terhadap sekolah favorit, dan keterbatasan infrastruktur pendidikan di daerah. Kajian ini menegaskan pentingnya penguatan kualitas sekolah di seluruh zona, transparansi mekanisme penerimaan peserta didik, dan evaluasi kebijakan berbasis pemerataan yang berkelanjutan untuk mencapai keadilan dan mutu pendidikan yang seimbang.

Kata kunci : kebijakan zonasi sekolah; keadilan akses; mutu pendidikan

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan fondasi utama pengembangan sumber daya manusia dan kemajuan peradaban bangsa. Melalui pendidikan yang merata dan bermutu, bangsa dapat mewujudkan masyarakat yang produktif, berdaya saing, dan berkeadilan sosial. Di Indonesia, salah satu kebijakan strategis untuk mencapai tujuan ini adalah kebijakan zonasi sekolah untuk penerimaan peserta didik baru (PPDB). Kebijakan ini diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 14 Tahun 2018, yang menekankan pemerataan akses pendidikan dengan mempertimbangkan jarak tempat tinggal siswa dan sekolah. Secara normatif, sistem zonasi ini bertujuan untuk menghilangkan stigma sekolah unggulan, mengurangi kesenjangan mutu antarsekolah, dan memastikan setiap anak memperoleh hak pendidikan yang sama (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2018).

Namun, setelah beberapa tahun implementasi, kebijakan ini telah menimbulkan dinamika dan perdebatan di berbagai daerah. Beberapa studi menunjukkan bahwa sistem zonasi tidak sepenuhnya mencerminkan akses yang adil atau distribusi mutu pendidikan yang merata. Beberapa sekolah unggulan tetap menjadi tujuan utama masyarakat, sementara sekolah-sekolah di daerah terpencil mengalami penurunan minat siswa dan keterbatasan sumber daya (Sidik, 2024). Situasi ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan struktural antara tujuan normatif kebijakan dan realitas implementasi di lapangan (Ula & Lestari, 2020). Lebih lanjut, persepsi publik terhadap sekolah "favorit" semakin memperparah ketidakseimbangan distribusi siswa, sehingga esensi pemerataan mutu tidak sepenuhnya terwujud (Murni & Haritani, 2024). Penerapan sistem zonasi yaitu menjadikan polemik bagi guru, terutama guru-guru yang mengajar di sekolah favorite mereka terbiasa mengajar siswa dengan kemampuan akademik yang tinggi, dengan adanya zonasi guru menjadi kewalahan dan pada akhirnya menggunakan strategi, dan metode mengajar yang ekstra untuk menghadapi perubahan tersebut.

Kajian terdahulu juga menyoroti bahwa zonasi berpengaruh positif terhadap perluasan akses pendidikan, khususnya bagi anak-anak dari keluarga berpenghasilan rendah yang tinggal di sekitar sekolah negeri (Patiung, 2024). Namun, peningkatan akses ini belum diikuti oleh peningkatan kualitas pembelajaran karena perbedaan fasilitas, kompetensi guru, dan kapasitas manajerial sekolah di setiap zona (Parameswara et al., 2022). Di tingkat global, kebijakan serupa seperti *school catchment area* di Inggris dan *school district zoning* di Amerika Serikat menunjukkan bahwa keberhasilan pemerataan pendidikan sangat bergantung pada kualitas sumber daya antar sekolah (Nieuwenhuis & Xu, 2021). Dengan demikian, isu pemerataan akses tidak dapat dipisahkan dari isu pemerataan mutu.

Dari tinjauan ini, dapat disimpulkan bahwa penelitian sebelumnya berfokus secara terpisah pada akses dan mutu pendidikan. Sebagian besar penelitian bersifat deskriptif dan kontekstual, terbatas pada wilayah atau tingkat tertentu, sehingga kurang memberikan gambaran komprehensif tentang hubungan antara zonasi, pemerataan akses, dan mutu pendidikan. Lebih lanjut, tinjauan sistematis terhadap temuan

penelitian zonasi di Indonesia masih sangat terbatas (Kauppinen et al., 2021). Berdasarkan kondisi ini, kebaruan ilmiah artikel ini terletak pada upaya untuk menyusun analisis komprehensif yang mengintegrasikan dua dimensi utama pemerataan akses dan mutu pendidikan sebagai tolok ukur keberhasilan kebijakan zonasi sekolah. Jadi artikel ini disusun dengan judul “ Dampak Kebijakan Zonasi Sekolah Terhadap Keadilan Akses dan Mutu Pendidikan”.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan jenis kajian pustaka (*literature review*) yang berfokus untuk menganalisis dampak kebijakan zonasi terhadap pemerataan akses dan mutu pendidikan di Indonesia. Metode ini dipilih untuk mengkaji fenomena secara holistik melalui analisis tematik terhadap sumber-sumber ilmiah tanpa melibatkan prosedur statistik, melainkan menekankan pada pemahaman terkait dampak kebijakan keadilan akses dan mutu pendidikan. Kriteria inklusi literatur yang ditetapkan mencakup relevansi substansial dengan topik yang diteliti dengan artikel nasional dan internasional. Sumber pencarian literatur dilakukan melalui basis data akademik seperti *Google Scholar*, *Garuda*, dan *ResearchGate* dengan rentang waktu 2019-2025. Berdasarkan proses seleksi tersebut terdapat 5 artikel yang di analisis. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan melalui strategi penelusuran literatur yang terstruktur dengan menggunakan kata kunci spesifik yang relevan dengan fokus penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerimaan peserta didik baru (PPDB) adalah penerimaan siswa untuk taman kanak-kanak, sekolah dasar, dan sekolah menengah pertama, yang diadakan pada awal tahun ajaran baru (Bachtiar et al., 2021). Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2017, dengan sistem zonasi, sekolahsekolah yang dikelola pemerintah daerah diwajibkan untuk menerima calon siswa yang berdomisili di dalam radius zona terdekat sekolah, yang mewakili setidaknya 90% dari total jumlah siswa yang diterima (Halimah, 2025).

Zonasi dalam penerimaan murid baru adalah suatu kebijakan yang telah diterapkan di berbagai negara, termasuk Indonesia, untuk mengatur distribusi siswa berdasarkan wilayah geografis (Setianingsih et al., 2025). Zonasi muncul akibat munculnya keluhan dari orangtua murid yang merasa tersisihkan akibat sekolah yang hendak di masuki lebih mengutamakan nilai yang bagus sehingga mengakibatkan anaknya kalah dengan anak lain yang memiliki nilai yang lebih tinggi dan sesuai kriteria yang diinginkan oleh sekolah tersebut. Sehingga mereka harus mencari sekolah lain yang bisa menerimanya dengan konsekuensinya jarak tempuh dari rumah menuju sekolah lumayan jauh ke sekolah swasta yang mana sekolah swasta lebih memakan biaya daripada sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah, untuk masyarakat yang memiliki kondisi ekonomi yang rendah tentunya hal ini menjadi beban bagi mereka (Widyastuti, 2020). Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menyatakan bahwa melalui sistem zonasi, pemerintah bertujuan untuk melaksanakan reformasi sekolah yang komprehensif. Tujuan pemerintah bukan hanya untuk mencapai kesetaraan akses terhadap layanan pendidikan, tetapi juga untuk memastikan kualitas yang setara (Bachtiar et al., 2021).

Pemerataan akses dan kualitas pendidikan mengacu pada pencapaian kesempatan yang sama dalam pendidikan, memastikan bahwa semua warga negara dapat dengan mudah memperoleh pendidikan (Ardi et al., 2023). Dalam mencapai akses pendidikan yang setara, ada dua aspek yang harus dipertimbangkan: 1) Kesetaraan kesempatan untuk memperoleh pendidikan, artinya akses pendidikan tersedia bagi semua penduduk usia sekolah; 2) keadilan dalam memperoleh pendidikan yang sama di dalam masyarakat, artinya pendidikan dapat diakses secara setara oleh semua etnis, agama, dan kelompok. Dalam implementasi pendidikan yang setara, kita dapat melihat bahwa sekolah-sekolah di kota-kota besar memiliki fasilitas dan infrastruktur pendidikan yang sangat maju, sementara di desa-desa atau daerah terpencil, banyak yang masih menggunakan fasilitas yang tidak memadai atau bahkan kekurangan tenaga pengajar. Pemerataan akses dan kualitas pendidikan mengacu pada pencapaian kesempatan yang sama dalam pendidikan, memastikan bahwa semua warga negara dapat dengan mudah memperoleh pendidikan (Sidik, 2024).

Tabel 1. Hasil Kajian Pustaka

Penulis dan Judul Penelitian	Hasil Kajian
<p>Riski Tri Widyastuti (2020) Dampak Pemberlakuan Sistem Zonasi Terhadap Mutu Sekolah dan Peserta Didik</p>	<p>Dampak Positif: (1) Zonasi dapat pemeratakan pendidikan dengan mengutamakan jarak tempuh, (2) Menguntungkan calon peserta didik yang rumahnya dekat sekolah, (3) Menghemat biaya dan tenaga transportasi, (4) Menghilangkan diskriminasi dan label sekolah favorit/non-favorit.</p> <p>Dampak Negatif: (1) Masih terjadi penyimpangan dan kecurangan dari oknum orangtua dan sekolah, (2) Calon peserta didik dengan nilai tinggi kesulitan masuk sekolah impian jika jarak jauh, (3) Guru mengalami kebingungan mengajar siswa dengan kemampuan beragam, (4) Motivasi belajar siswa menurun karena tidak ada kompetisi nilai, (5) Prestasi sekolah menurun, (6) Banyak calon siswa terlantar karena tidak diterima di sekolah zona.</p>
<p>Risna, Lisdahlia, Syamsul Edi (2020) Analisis Implementasi Kebijakan Zonasi dalam Pemerataan Pendidikan</p>	<p>Dampak bagi Sekolah dan Guru: (1) 79% dampak negatif, 21% dampak positif, (2) 86% guru menyatakan sistem zonasi berdampak negatif karena komposisi siswa dengan nilai rendah yang beragam, (3) Guru kesulitan mengondisikan kelas, (4) Banyak siswa memperoleh nilai di bawah KKM, (5) Pelanggaran tata tertib meningkat (membolos, terlambat, berkelahi), (6) Daya juang siswa rendah, (7) Kurang sopan santun terhadap guru, (8) Prestasi sekolah menurun.</p> <p>Dampak bagi Masyarakat: (1) 64% dampak negatif, 36% dampak positif, (2) Daya juang siswa menurun, (3) Harga rumah di sekitar sekolah favorit meningkat, (4) Manipulasi tempat</p>
	<p>tinggal oleh oknum wali siswa, (5) Blank spot di beberapa wilayah kecamatan.</p>

<p>Lakoro, Lia Nalatina Nada, Jalaludin (2025) Efektivitas Kebijakan Zonasi dalam Pemerataan Akses Pendidikan Berkualitas: Tinjauan Literatur</p>	<p>Aksesibilitas: (1) Kebijakan zonasi berhasil meningkatkan aksesibilitas geografis dan mengurangi hambatan jarak tempuh, (2) Belum optimal dalam pemerataan distribusi peserta didik secara proporsional, (3) Beberapa sekolah mengalami over capacity, sekolah lain kekurangan siswa hingga terancam tutup (contoh: 2 SD di Kota Tanjungpinang tutup tahun 2023).</p> <p>Kualitas: (1) Kesenjangan kualitas pendidikan antarsekolah tetap persisten, (2) Zonasi tidak diiringi intervensi peningkatan kualitas komprehensif, (3) Rasio murid-sekolah sangat tinggi mencapai 451,90 di Kecamatan Makasar Jakarta Timur.</p> <p>Hambatan: (1) Ketidakmerataan infrastruktur pendidikan, (2) Manipulasi data domisili, (3) Resistensi masyarakat terhadap pembatasan pilihan sekolah, (4) Keterbatasan kapasitas SDM pengelola pendidikan, (5) Sistem monitoring dan evaluasi belum optimal.</p>
<p>Oktaviani, Azhar Hayatunnisa, Linda Aulia, Tasya Adela Talitha (2025) Evaluasi Dampak Kebijakan Sistem Zonasi Terhadap Pemerataan Akses Pendidikan di Tingkat Sekolah Dasar dan Menengah</p>	<p>Kuota Jalur: (1) Jalur zonasi memiliki kuota 50-70% dari kapasitas sekolah (maksimum), (2) Jalur prestasi maksimum 10%, (3) Jalur afirmasi 15%, (4) Jalur transfer domisili maksimum 5%. Dampak Positif: (1) Mengurangi biaya transportasi, (2) Efisiensi waktu perjalanan siswa, (3) Memudahkan pengawasan orang tua, (4) Lingkungan belajar lebih dekat dengan rumah.</p> <p>Dampak Negatif: (1) Kualitas sekolah yang tidak merata masih terjadi, (2) Kekecewaan dan demotivasi siswa yang tidak diterima di sekolah impian mereka, (3) Potensi kecurangan ("titip alamat"), (4) Menghilangkan persaingan sehat, (5) Jumlah siswa yang tidak sama antar sekolah, (6) Persepsi negatif orang tua tentang pembatasan hak untuk memilih sekolah.</p>
<p>Umiati, Sumardi, Bagdawanyah Alqadri, Muh. Zubair, Ary Purwantiningsih (2024) Dampak Sistem Zonasi Terhadap Mutu Pendidikan (Studi Kasus di SMPN 5 Pringgabaya)</p>	<p>Temuan Perencanaan Pembelajaran: (1) Keragaman latar belakang dan kemampuan siswa lebih luas, (2) Guru menyesuaikan materi dan alat pembelajaran, (3) Evaluasi dan penyesuaian metode pengajaran dilakukan secara berkala, (4) Dokumentasi RPP menunjukkan penyesuaian yang lebih responsif terhadap metode pengajaran, (5) Perubahan kriteria penilaian lebih inklusif.</p> <p>Temuan Implementasi Pembelajaran: (1) Metode pengajaran sebelumnya tidak bervariasi (ceramah), (2) Guru sekarang mengadaptasi berbagai metode (diskusi kelompok, pembelajaran berbasis proyek), (3) Pendekatan personal meningkatkan motivasi belajar siswa, (4) Observasi menunjukkan berbagai tingkat partisipasi aktif.</p> <p>Temuan Penilaian: (1) Penilaian lebih fleksibel (formatif, berbasis proyek, presentasi, autentik), (2) Guru menggunakan kombinasi penilaian tradisional dan berbasis proyek. Temuan</p>

	<p>Hasil Pembelajaran: (1) Nilai rapor siswa tetap stabil, (2) Tidak ada penurunan nilai rata-rata meskipun terdapat keragaman kemampuan.</p> <p>Temuan Strategi Sekolah: (1) Program pengembangan dan pelatihan guru (metode inovatif, teknologi), (2) Penguatan komunikasi dengan orang tua (pertemuan rutin, grup WhatsApp), (3) Dokumentasi menunjukkan bahwa kegiatan pelatihan dan pertemuan orang tua dilaksanakan secara aktif.</p>
--	---

Berdasarkan sintesis terhadap berbagai penelitian, kebijakan zonasi sekolah menunjukkan dampak yang kompleks dan tidak linier antara upaya mewujudkan keadilan akses pendidikan dan peningkatan mutu pendidikan. Secara umum, hasil kajian menunjukkan bahwa kebijakan zonasi relatif lebih berhasil dalam menciptakan keadilan akses pendidikan dibandingkan dengan pemerataan mutu pendidikan.

Dampak Kebijakan Zonasi terhadap Mutu dan Kualitas Pendidikan

Kebijakan zonasi juga membawa konsekuensi terhadap mutu dan kualitas sekolah. Berdasarkan hasil analisis literatur, dampaknya masih bersifat paradoksal di satu sisi menciptakan heterogenitas peserta didik, namun di sisi lain memperlebar disparitas mutu antar sekolah. Penelitian Sidik, (2024) menunjukkan bahwa meskipun kebijakan zonasi di Kabupaten Sleman berhasil menata distribusi peserta didik, belum terlihat peningkatan signifikan dalam kualitas proses pembelajaran. Sekolah-sekolah unggulan tetap mendominasi prestasi akademik, sedangkan sekolah nonfavorit masih berjuang dengan keterbatasan fasilitas dan sumber daya guru.

Hal serupa ditemukan oleh Ula & Lestari, (2020) di Kota Malang. Komposisi siswa menjadi lebih beragam dari segi kemampuan akademik dan sosial ekonomi. Meskipun hal ini dapat menjadi potensi pembelajaran yang inklusif, guru sering kali kesulitan dalam melakukan diferensiasi pembelajaran karena belum mendapat pelatihan yang memadai. Kondisi ini menyebabkan penurunan standar mutu di beberapa sekolah. Sebaliknya, penelitian Parameswara, Iskandar, & Amelia, (2022) menemukan sisi positif kebijakan ini. Zonasi dapat mendorong inovasi sekolah, seperti peningkatan program pembinaan karakter dan penguatan hubungan dengan masyarakat sekitar. Namun, mereka menegaskan bahwa inovasi hanya terjadi pada sekolah dengan kepemimpinan yang adaptif dan dukungan manajemen yang baik. Kebijakan zonasi dapat menciptakan kesetaraan akses pendidikan sebab dapat menghapus dikotomi antara sekolah favorite dan non favorite (Ariska, 2024).

Dampak positif

- 1) Pemerataan Akses Pendidikan: Memberikan kesempatan yang lebih adil bagi calon siswa untuk bersekolah di sekolah terdekat tanpa terpaku pada status "favorit" sekolah.
- 2) Mengurangi Kesenjangan Kualitas: Mendorong peningkatan kualitas semua sekolah karena siswa berprestasi tidak lagi hanya terkumpul di sekolah tertentu.
- 3)

Efisiensi Biaya dan Waktu: Mengurangi biaya transportasi dan waktu tempuh siswa ke sekolah karena dapat bersekolah di sekitar tempat tinggal.

4) Lingkungan Belajar yang Lebih Dekat: Memungkinkan siswa berinteraksi dan belajar dengan teman sebaya di lingkungan tempat tinggalnya.

5) Mempermudah Pengawasan Orang Tua: Orang tua lebih mudah mengawasi dan terlibat dalam pendidikan anak karena jarak rumah dan sekolah yang dekat.

Dampak negatif

1) Ketidakmerataan Kualitas Sekolah: Zonasi tidak secara otomatis meningkatkan kualitas semua sekolah. Sekolah di zona tertentu mungkin masih kekurangan fasilitas, guru berkualitas, atau program yang memadai.

2) Kekecewaan dan Demotivasi Siswa: Siswa berpotensi tidak dapat bersekolah di sekolah yang mereka inginkan atau anggap lebih baik, yang dapat menurunkan motivasi belajar. Dampak pada Sekolah Favorit: Sekolah yang dulunya dianggap favorit bisa kehilangan sebagian siswa berprestasi karena mereka tidak lagi menjadi satu-satunya pilihan.

3) Ketidakmerataan Jumlah Siswa: Ada kemungkinan terjadi penumpukan siswa di beberapa sekolah dan kekurangan di sekolah lain dalam satu zona.

4) Persepsi Negatif Orang Tua: Orang tua mungkin merasa hak mereka untuk memilih sekolah terbaik bagi anak-anaknya dibatasi.

Faktor-Faktor Penghambat dan Pendukung Efektivitas Kebijakan Zonasi Sekolah

Faktor pendukung implementasi zonasi meliputi:

1. Desain kebijakan yang kontekstual, yaitu penyesuaian radius zonasi dengan kondisi geografis dan jumlah sekolah di wilayah tertentu (Sesanti & Imron, 2024)

2. Sosialisasi yang efektif kepada masyarakat dan pihak sekolah sehingga tujuan pemerataan lebih dipahami (Patiung et al., 2024).

3. Transparansi dalam sistem PPDB daring dan verifikasi domisili, yang meminimalkan praktik manipulasi Situmorang, (2025) Faktor penghambat yang ditemukan antara lain:

1. Ketimpangan sarana dan prasarana antar sekolah, yang menyebabkan perbedaan mutu tetap tinggi (Sidik, 2024; Ula & Lestari, 2020).

2. Persepsi masyarakat terhadap sekolah favorit, yang menimbulkan resistensi sosial terhadap kebijakan (Rita, 2024; Ardi, 2023).

3. Keterbatasan jumlah sekolah di wilayah terpencil, sehingga prinsip zonasi sulit diterapkan (Patiung et al., 2024).

4. Lemahnya sistem evaluasi kebijakan di tingkat daerah, karena belum ada instrumen monitoring yang baku (Mulyaningsih et al., 2022).

SIMPULAN

Berdasarkan sintesis berbagai penelitian, kebijakan zonasi sekolah menunjukkan dampak yang kompleks terhadap keadilan akses dan mutu pendidikan. Secara umum, zonasi relatif efektif dalam memperluas keadilan akses pendidikan dengan memprioritaskan kedekatan domisili, mengurangi biaya transportasi, serta membuka peluang bersekolah bagi peserta didik dari latar belakang sosial ekonomi rendah.

Kebijakan ini juga berkontribusi mengurangi stigma sekolah favorit dan non-favorit secara normatif. Namun demikian, perluasan akses tersebut belum diikuti oleh pemerataan mutu pendidikan. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa ketimpangan kualitas sekolah, keterbatasan sarana prasarana, kesiapan guru menghadapi heterogenitas siswa, serta lemahnya manajemen dan pengawasan kebijakan masih menjadi persoalan utama. Di beberapa konteks, zonasi bahkan berdampak pada penurunan motivasi belajar, prestasi sekolah, dan meningkatnya praktik manipulasi domisili. Temuan lain menunjukkan bahwa zonasi dapat berdampak positif terhadap mutu apabila disertai kepemimpinan sekolah yang adaptif, inovasi pembelajaran, dan dukungan kebijakan peningkatan kualitas. Dengan demikian, keadilan akses dan mutu pendidikan dalam kebijakan zonasi merupakan dua dimensi yang saling terkait dan tidak dapat dipisahkan, sehingga zonasi perlu diposisikan sebagai kebijakan akses yang harus diperkuat dengan strategi pemerataan mutu secara sistemik.

DAFTAR REFERENSI

- Ardi, Muhammad Danil, Dewi Murni, Nurhizrah Giastituati, Rusdinal, Fauziah Herv. (2023). The Implementation of Student Admission Based on Zoning in Indonesia : Problems, Challenges, and Solutions. *Jurnal Kependidikan*, 9(3), 914–923. <https://doi.org/https://doi.org/10.33394/jk.v9i3.8632>
- Ariska, Muhammad sholeh. (2024). Analisis Kebijakan Zonasi: Dampak Polemik Kebijakan Zonasi Pendidikan Indonesia. *Jurnal Teknologi Dan Pendidikan*, 1(1), 1–20. <https://doi.org/https://doi.org/10.35870/jtp.v1i1.861>
- Bachtiar, Yusuf, Mulyani, Memei Sri, & Maharani, Nurnissa. (2021). Evaluasi Sistem Zonasi Untuk Keadilan Penerimaan Siswa Baru. *Current Research in Education*, 01(01), 1–8.
- Halimah, Siti, Damayanti, Putri Elvina, Adawiyah, Robiatul, Nuriya, Sinta, & Kholda, Sinta Nuriya. (2025). Analysis of the Implementation of the Zoning System Policy and its Impact on Islamic Educational Institutions. *Jurnal Inovatif Manajemen Pendidikan Islam*, 04(01), 41–49. <https://doi.org/10.38073/jimpi.v4i1.1910>
- Irene Dian Patiung. (2024). *Dampak Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Pendidikan Terhadap Masyarakat Di Kecamatan Buntao' Kabupaten Toraja Utara*. 22(2), 227–241. <https://doi.org/https://doi.org/10.35580/lageografia.v22i2.52099>
- Kauppinen, Timo M., Ham, Maarten Van, & Bernelius, Venla. (2021). Understanding the effects of school catchment areas and households with children in ethnic residential segregation. *Housing Studies*, 0(0), 1–25. <https://doi.org/10.1080/02673037.2020.1857707>
- Lakoro, Nurhidayah, Nada, Lia Nalalina, Pai, Jurusan P. J. J., Tarbiyah, Fakultas, Siber, U. I. N., & Nurjati, Syekh. (2025). Efektivitas Kebijakan Zonasi dalam Pemerataan Akses Pendidikan Berkualitas : Tinjauan Literatur. *Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)*, 4(4), 4630–4640.
- Murni, Rita Kartika, & Haritani, Hartini. (2024). Dampak Kebijakan Zonasi Di Sekolah SMP (Perspektif Orang Tua dan Evaluasi Implementasi). *JOEAI (Journal of Education and Instruction)*, 7, 70–78. <https://doi.org/https://doi.org/10.31539/joeai.v7i1.8160>
- DAMPAK
- Nieuwenhuis, Jaap, & Xu, Jiayi. (2021). *Residential Segregation and Unequal Access to*

- Oktaviani, Via. (2025). Evaluasi Dampak Kebijakan Sistem Zonasi Terhadap Pemerataan Akses Pendidikan di Tingkat Sekolah Dasar dan Menengah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi*, 1(2), 71–77.
- Parameswara, Marsanda Claudia, Iskandar, Mochammad Fahmi, & Amelia, Riski Fauzi. (2022). *Pengaruh Kebijakan Sistem Zonasi bagi Sekolah dalam Penerimaan Peserta Didik Baru*. 6(1), 9570–9578.
- RIIsna. (n.d.). Analisis implementasi kebijakan zonasi dalam pemerataan pendidikan. *Journal IAIN Bone*.
- Sesanti, Hayuning, & Imron, Ali. (2024). *Revitalization of Zoning Policy in Indonesia to Ensure School Availability for Students Based on the School Zoning System in Japan*. 36, 109–117.
- Setianingsih, Susiana, Khair, Otti Ilham, Kusuma, Gede Wijaya, & Permatasari, Marisa. (2025). *Zonasi Dalam Penerimaan Penyelesaiannya Murid Baru : Dampak Dan*. 3(4), 1623–1627.
- Sidik, Fajar. (2024). Pelaksanaan kebijakan zonasi sekolah dan dampaknya terhadap kualitas sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama: Studi kasus di Kabupaten Sleman Yogyakarta. *Humanika*, 24(1), 47–56. <https://doi.org/10.21831/hum.v24i1.68551>
- Situmorang, Putri Anjelina. (2025). *Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru SMA Negeri 2 di Kota Medan* 1. (1), 61–71.
- Ula, Dany Miftahul, & Lestari, Irvan. (2020). *Dampak Sistem Zonasi bagi Sekolah Menengah Pertama* 1. 5, 10–18.
- Umiati, Tina. (2024). Dampak Sistem Zonasi Terhadap Mutu Pendidikan (Studi Kasus di SMPN 5 Pringabaya). *Jurnal Inovasi Penelitian Pendidikan Dan Pembelajaran*, 4(4), 860–871.
- Widyastuti, Riski Tri. (2020). Dampak Pemberlakuan Sistem Zonasi Terhadap Mutu Sekolah Dan Peserta Didik. *Edusaintek : Jurnal Pendidikan, Sains Dan Teknologi*, 7(1), 11–19. <https://doi.org/10.47668/edusaintek.v7i1.46>